

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menyiapkan masa pensiun merupakan hal yang dilakukan sebagian besar orang yang telah bekerja. Dalam persiapannya tidak dilakukan hanya oleh mereka yang akan atau sudah mendekati masa pensiun, akan tetapi hal ini juga perlu dipersiapkan sejak awal. Satu hal yang merupakan paling penting dalam persiapan tersebut tidak lain adalah dana pensiun itu sendiri. Dana pensiun itu sendiri sebaiknya tersedia dalam jumlah yang besar sehingga untuk mempersiapkannya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Semua yang menjadi karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah pasti akan pensiun. Aturan kepegawaian perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) membatasi masa kerja karyawan sampai usia 55 tahun atau usia produktif pegawai adalah kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun. Begitu memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun maka karyawan akan pensiun. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu seperti guru dan dosen dengan masa kerja sampai usia 60 (enam puluh) tahun. Pada saat ini, tingkat dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin dibatasi oleh Pemerintah. Penerimaan pegawai negeri selalu ramai diikuti oleh masyarakat. Termasuk juga tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang

banyak diikuti oleh masyarakat. Baik itu yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Dana pensiun menjadi sarana penghimpun dana guna untuk meningkatkan kesejahteraan peserta pensiun. Peserta merupakan orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun untuk menjadi penerima manfaat pensiun. Penyelenggaraan program pensiun selain memberikan manfaat bagi karyawan juga bermanfaat bagi pemberi kerja atau perusahaan dan pemerintah. Program pensiun ialah program yang berupaya menyediakan uang yang disebut dengan manfaat pensiun yang di peruntukkan bagi para pesertanya. Dana ini sangat dibutuhkan ketika seseorang telah memasuki usia tidak produktif dan penghasilan telah terhenti. Ketika memasuki usia tidak produktif tersebut, sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Keikutsertaan seseorang pada dana pensiun dapat menjadi salah satu solusi mereka.

Dana pensiun sangat diperlukan dan berguna bagi mereka yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan penghasilan lagi. Maka dari itu dana pensiun itu sendiri sangatlah penting untuk kehidupan mereka yang berusia lanjut yang sudah tidak produktif lagi.

Dalam penerimaan dana pensiun juga perlu diperhatikan atas perlakuan pajaknya, karena tidak jarang bagi peserta dana pensiun atau mereka yang sudah memasuki usia lanjut dan tidak produktif lagi hanya mengetahui tentang jumlah dari dana yang didupakannya tersebut.

Dana pensiun penting untuk setiap orang apalagi untuk pekerja. Dengan program pensiun, kesejahteraan dan pendapatan seseorang pada hari tua lebih terjamin. Sementara itu bagi perusahaan, program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan yang mengetahui bahwa tugasnya telah terjamin, yang pada gilirannya mereka akan loyal terhadap perusahaan serta akan bekerja lebih produktif. Demikian pula pemimpin perusahaan akan mendapat ketenangan untuk bekerja karena tidak akan timbul PHK besar sebagai bagian dari program pensiun.<sup>2</sup>

Ada tiga hal yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong pensiun, yaitu:

1. Aspek keuangan.

Keuangan pensiun belum tentu dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sebagian pensiunan tetap melakukan kegiatan pekerjaan lain atau memiliki usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan setelah pensiun.

2. Aspek pengisian waktu.

Setelah pensiun bagi pensiunan yang sudah terbiasa punya kesibukan, begitu tidak ada lagi kesibukan maka akan menjadi masalah tersendiri. Maka dari itu, pensiunan memiliki rencana mengenai bagaimana mengisi waktu setelah pensiun.

---

<sup>2</sup> Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dkk, “*Bank dan Financial Institution Management*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, edisi pertama), hlm.166

### 3. Masalah kesehatan.

Seiring dengan bertambahnya usia maka sudah pasti kebugaran dalam tubuh kita berkurang. Bagi yang sejak muda terbiasa menjalankan pola hidup sehat

maka badannya akan lebih sehat dan lebih nyaman. Tapi kalau sudah sakit-sakitan maka hidup menjadi lebih berat. Biaya berobat yang semakin mahal akan menguras banyak tabungan.

Ada pensiunan yang memilih aktif pada kegiatan hobi yang disukai, atau kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, ada yang berbisnis dan sebagainya. Ada pun juga pensiunan yang berfikir untuk memulai mendirikan sebuah usaha atau berwirausaha, agar tidak mengalami kekosongan kegiatan sehari-hari pada masa yang sudah tidak produktif lagi. Dengan tetap memiliki kesibukan maka hidup kita akan menjadi seimbang, serta otak dan otot terus berfungsi optimal. Jika sudah punya kegiatan yang menyenangkan maka sedikit persoalan dapat teratasi.<sup>3</sup>

Bagi pemberi kerja, memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya merupakan kewajiban moral dan perlu diwujudkan kepada karyawan yang telah mengabdikan untuk beberapa waktu lamanya, sekaligus

---

<sup>3</sup> Fahmi Tanjung, dan Wahyu Ario, “Analisis Pemanfaatan Dana Pensiun Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Pns Pensiunan Guru Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 58

untuk mengikat loyalitas atau kesetiaan karyawan kepada perusahaan, dan juga meningkatkan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja. Rencana pensiun yang telah dilakukan karyawan merupakan suatu komitmen jangka panjang, dimana sebagian besar rencana berisikan sesuatu ketentuan bahwa dimana setiap karyawan yang telah mencapai suatu usia tertentu dapat dipensiun dan menerima suatu jumlah tertentu yang dapat ditentukan selama setiap tahun masa pensiun itu. Terkait dengan berbagai penghasilan yang dimiliki pemilik dana pensiun, kewajiban mengenai pajak tentu menjadi hal yang wajib dipahami oleh pemilik dana pensiun, termasuk saat pensiun kelak.

Pensiun merupakan penghasilan yang diperoleh setelah karyawan atau pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil sudah berusia lanjut atau memasuki usia tidak produktif lagi. Program pensiun bermanfaat bagi pemerintah, karena dengan adanya program pensiun dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam menghadapi masalah sosial yang mungkin akan timbul apabila anggota masyarakat memasuki usia lanjut dan mereka tidak lagi memiliki penghasilan.

Pensiun tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan dan ketenangan khususnya perihal ekonomi pada usia yang sudah tidak produktif lagi dalam masa lanjut usia karena sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, yang akan dinikmati manfaatnya oleh mereka yang saat ini masih muda. Pernyataan berikut merupakan suatu kebenaran dimana terdapat program jaminan hari tua yakni program pensiun, yang biasa dikenal

dengan nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri dengan tujuannya untuk memperoleh pensiun di masa tuanya pada tahun 70-an sampai 80-an. Penerima pensiunan itu sendiri merupakan orang pribadi atau ahli warisnya yang mengambil imbalan tersebut atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.<sup>5</sup> Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun atau pensiun pokok, ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan.

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kedudukan dan peranan yang penting serta menentukan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional pada

---

<sup>4</sup> *Pentingnya Mengenal dan Memahami Lembaga Dana Pensiun*, artikel diakses pada tanggal 19 Juli 2020 dari <http://www.Sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2003/0523/eurl.htm>

<sup>5</sup> Christopher Lee, “*Aplikasi dan Terapan Perpajakan dengan Excel*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 13

pokoknya tergantung dari tekad, semangat, sikap mental, dan kedisiplinan unsur aparatur negara. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kedisiplinan dan sikap mental yang baik dapat membantu kelancaran dalam pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 388/MP/1960 disebutkan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya pada saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara.”<sup>6</sup>

Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan atau ditugaskan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta

---

<sup>6</sup> Adi Kurniawan, “*Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta*”, Tugas Akhir, 2009.

tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun atau tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Sistem self assessment*. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran atau penyetoran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP). Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terhutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Adapun yang menjadi landasan hukum pajak adalah sebagai berikut:

Al-Quran QS. Al-Anfal: 41

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>7</sup>

Adanya progam dana pensiun ini guna untuk mensejahterakan dan menjamin hari tua subjek pajak atau lebih jelasnya peserta dana pensiun

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzan, 2017, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, *Jurnal Human Falah*, Vol. 4 No. 1 Desember 2017, hlm. 176



kelak terutama guru Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung. Bagi pegawai yang sudah pensiun dan tidak memiliki penghasilan lagi, sudah tidak diwajibkan lagi untuk membayar pajak akan tetapi cukup dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT).

Terdapat beberapa ketentuan bagi industri program dana pensiun yang dikenakan pajak yaitu pada saat pemberi kerja atau peserta dana pensiun melakukan pembayaran iuran pensiun, dana pensiun mendapatkan pendapatan dari hasil investasi yang dilakukan, dan saat peserta dana pensiun mendapatkan uang manfaat pensiun.<sup>8</sup>

Pada beberapa ketentuan berikut program dana pensiun merupakan program jaminan pada hari tua yang bertujuan untuk mensejahterakan karyawan atau pegawai pada saat memasuki usia yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja lagi.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan

---

<sup>8</sup> Cintya Imelda, 2016, “Analisa Pencatatan Pemotongan Iuran Dana Pensiun PT POS Indonesia Cabang Manado”

perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam perhitungan mengenai pembayaran pajak, terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran hutang pajak setiap bulannya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung menggunakan sistem pembayaran pajak yang digunakan di Indonesia yaitu dengan *Self Assesment* dimana penerima dana pensiun melakukan pembayaran pajak serta penyetoran pajak sendiri dan dapat dibayarkan melalui kantor pos, bank, atau Kantor Pelayanan Pajak.

Karena situasi dan kondisi yang membatasi penelitian dan tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas lagi, maka penelitian ini sangatlah terbatas.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan perlakuan biaya pajak dana pensiun terhadap pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung khususnya pada pemotongan pajaknya, penyetoran

pajaknya, serta pelaporan pajak yang diberlakukan oleh pihak yang bersangkutan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada masalah yang akan diteliti agar sesuai dan tidak terjadi perluasan pembahasan pada penelitian. Berikut pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan pemotongan pajak bagi penerima dana pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung?
2. Bagaimanakah penyetoran pajak penerima dana pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung?
3. Bagaimanakah pelaporan pajak penerima dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan dengan fokus masalah dari penelitian, peneliti akan menyajikan tujuan dari fokus masalah yang telah disajikan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perhitungan pemotongan pajak penerima dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penyetoran pajak penerima dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan pelaporan pajak penerima dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Dalam penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu akuntansi terutama untuk akuntansi perpajakan. Dalam ilmu pengetahuan bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang perlakuan pajak bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya pemotongan pajaknya, dan penyetoran pajaknya, serta pelaporan pajak atas dana pensiun khususnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selain itu digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sudah sesuai konsep atau teori yang berlaku.

##### **2. Manfaat Praktis.**

Dalam penelitian ini, diharapkan kontribusi yang akan diberikan penulis kepada pihak yang bersangkutan ialah sebagai berikut:

###### **a. Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan kontribusi yang akan diberikan penulis kepada institusi yang terkait ialah sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan keilmuan guna bertujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan agar sesuai dengan perlakuan yang berlaku kedepannya.

b. Bagi Akademisi.

Digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan atau referensi kepada siapapun yang akan melakukan penelitian mengenai pengetahuan pajak yang diberlakukan untuk pensiun Pegawai Negeri Sipil.

c. Bagi Pihak Lain.

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai pajak yang diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun, dan sebagai tambahan wawasan untuk peneliti agar kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan penelitian dengan objek yang berbeda.

**E. Batasan Masalah.**

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisis yang dilakukan selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian di latar belakang, maka peneliti berusaha mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perlakuan pajak dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Karena kondisi dan situasi yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas peneliti hanya berfokus pada penerima pensiun yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini pembatasan yang dapat muncul ialah pemotongan pajak dana pensiunan yang dilakukan terhadap penerima dana pensiun yaitu pensiunan guru dan Kepala Sekolah di SDN 01 Pulosari

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, pensiunan Kesehatan yaitu Bidan di RS Iskak Tulungagung, dan Pensiunan ABRI.

## **F. Penegasan Istilah.**

Peneliti menyajikan gagasan istilah yang dilakukan dengan mendefinisikan secara konseptual dan operasional.

### **1. Definisi Konseptual.**

Peneliti akan menyajikan istilah-istilah tersebut yang mungkin istilah-istilah tersebut belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang bersangkutan. Istilah-istilah ini ditegaskan dalam rangka menghindari kesalahpahaman dari pembaca

#### **a. Definisi Pajak menurut pakar.**

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sumbangan yang dilakukan untuk Negara ini sifatnya memaksa, guna keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
- 2) Menurut Sumitro, pajak ialah iuran yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku kepada kas Negara dan hal ini bisa dikatakan dilakukan dengan paksaan atau sifatnya yang memaksa dan dengan tidak mendapat imbalan atau jasa timbal balik secara

langsung kepada masyarakat dipergunakan untuk pembayaran umum.<sup>9</sup>

b. Dana Pensiun menurut para ahli atau pakar:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengatur berjalannya program pensiun guna memberikan kesejahteraan pegawai suatu perusahaan terutama pegawai yang telah pensiun.<sup>10</sup>

c. Definisi Pensiunan

- 1) Menurut Martoyo, Pensiunan pegawai adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena suatu sebab tertentu, dengan ganti rugi yang dilakukan berkali-kali sebagai jaminan hari tua.
- 2) Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, sedangkan uang pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) atau anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018), hlm.3

<sup>10</sup> Andika Nussy, 2014, “*Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado*”

<sup>11</sup> Adi Qurniawan, “*Prosedur Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta*”, Tugas Akhir, 2019.

d. Definisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Definisi Operasional**

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk rakyat pula guna untuk memajukan kesejahteraan Negara yang bersifat wajib.
- b. Dana Pensiun merupakan hak seseorang yang sudah memasuki usia pensiun yang telah bekerja sekian tahun untuk memperoleh penghasilan sesuai perjanjian yang ditetapkan perusahaan.
- c. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja.
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada setiap warga Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, peneliti memaparkan tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Sistematika pembahasan disini memiliki tujuan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti. Di bawah ini merupakan sistematika penulisan skripsi yang ditulis oleh peneliti, antara lain:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal penelitian ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Dalam bagian utama ini terbagi menjadi 6 bab, antara lain:

#### **a. Bab I**

Pada bab ini adalah yang berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini menjelaskan serangkaian mengenai maksud dan tujuan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **b. Bab II**

Pada bab berikut yang berisi kajian pustaka, dimana menjelaskan mengenai teori-teori tentang pajak, dana pensiun,

pensiunan, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil), hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir teoritis.

c. Bab III

Pada bab berikut yang berisi tentang metode penelitian, dimana dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan teknik analisis yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV

Pada bab berikut yang berisi Hasil Penelitian, dimana bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi para informan yaitu pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung.

e. Bab V

Pada bab ini terdapat Pembahasan, dimana dalam bab ini berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

f. Bab VI

Pada bab ini merupakan bab Penutup, dimana pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir penelitian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.